

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
[BKPSDM]**



RENCANA KERJA PERUBAHAN 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas karunia dan ridhanya, Perubahan Rencana Kerja (RENJA) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2022 telah selesai disusun. Penyusunan dokumen ini diperlukan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar 2021-2026 maupun terkait dengan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Kota Blitar.

Maksud penyusunan perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 ini untuk menyediakan dokumen perubahan perencanaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 dengan mengacu pada perubahan RKPD Tahun 2022. Sehingga dapat sebagai pedoman penyusunan perubahan KUAPPAS Tahun 2022 dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2022.

Masukan mengenai penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja tahun 2022 ini sangat diharapkan untuk memberikan kontribusi yang lebih baik bagi keberhasilan pencapaian program, kegiatan, dan sub kegiatan bagi Pemerintah Kota Blitar umumnya dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada khususnya.

Blitar, 5 Agustus 2022
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia



KUSNO. S. Sos

Pembina Tk. I

NIP.196707221992021002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum.....	6
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TRIBULAN II	11
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2022	20
3.1. Rekapitulasi Perubahan Kegiatan Renja Tahun 2022	20
3.2. Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2022	23
BAB IV PENUTUP.....	31
4.1. Kaidah Pelaksanaan	31
4.2. Rencana Tindak Lanjut.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2022 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2022. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar dalam pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan 2 (dua) pada tahun 2022 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2022, menunjukkan adanya

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan didasarkan adanya kebijakan bidang kepegawaian yang mempengaruhi pendapatan dan belanja tahun 2022 serta didasarkan pada evaluasi kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2022 dan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2021, antara lain sebagai berikut:

- 1) Perubahan kebijakan di bidang kepegawaian utamanya pembiayaan untuk peningkatan kompetensi ASN, seperti Pemanfaatan teknologi IT untuk penyelenggaraan beberapa diklat dan pelatihan;
- 2) Beberapa kegiatan yang belum bisa dilaksanakan secara new normal, sehingga diperlukan pemanfaatan sumber dana untuk hal lain;
- 3) Kondisi sarana prasarana penunjang kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dipandang prioritas; dan
- 4) Perubahan belanja daerah terkait penanganan dan pemulihan Covid-19 yang telah berakhir, sehingga pembiayaan untuk biaya penunjang kegiatan seperti penyediaan sarpras pencegahan covid-19 yang harus dihapuskan, penyesuaian pemetaan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta penyesuaian anggaran atas evaluasi kebutuhan Perangkat Daerah serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya guna mendukung pencapaian kinerja tahun 2022.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2022 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2022, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2022 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2022 pada mekanisme Perubahan APBD Kota Blitar Tahun 2022.

Dari sisi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian target-target RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026, khususnya target indikator kinerja daerah pada tahun 2022. Dengan berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kota Blitar yang harus disesuaikan, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2022 yang didasarkan pada asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka

pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2022. Sehingga penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2022 mengacu pada program strategis daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar tahun 2022 berdasarkan pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar tahun 2011 – 2030;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 13) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- 20) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 21) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
- 22) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar;
- 23) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025;
- 24) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 25) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021; dan
- 26) Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1.3 Maksud dan Tujuan

Disusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dimaksudkan sebagai pedoman dan arah bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar dalam melaksanakan perubahan terhadap program dan kegiatan dalam tahapan perubahan di tahun 2022 sesuai hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan II (dua) tahun 2022.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai berikut:

- 1) Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan triwulan dua tahun 2022;
- 2) Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
- 3) Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;

- 4) Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah; serta
- 5) Mewujudkan sinkronisasi substansi dokumen Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2022 dengan dokumen Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2022

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), bahwa perubahan renja perangkat daerah ditetapkan berdasarkan perda RKPD. Sedangkan dasar pertimbangan perubahan RKPD yang ditindaklanjuti dengan perubahan renja perangkat daerah menurut Permendagri tersebut adalah adanya perubahan pada :

- 1) Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- 2) Target sasaran pembangunan daerah;
- 3) Prioritas pembangunan daerah;
- 4) Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah; dan

Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- Latar Belakang

- Landasan Hukum
- Maksud dan Tujuan
- Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 sampai dengan Tribulan II

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022.

BAB IV Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2022 SAMPAI
DENGAN TRIBULAN II

Realisasi target kinerja output kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Triwulan II terdapat beberapa capaian, yaitu ada yang tercapai sesuai target terutama untuk kegiatan rutin, dan ada yang masih proses pencapaian target yang direncanakan tercapai sampai pada akhir tahun anggaran 2022.

Sedangkan untuk realisasi anggaran kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2022 yang melaksanakan 2 urusan penunjang pemerintahan, 3 program dengan 11 kegiatan dan 26 sub kegiatan, dengan anggaran Belanja Rp. 19.550.725.793,- dengan capaian realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Tahun 2022 sebesar Rp. 5.788.220.244,- atau 29,61%. Pencapaian realisasi anggaran triwulan II relatif rendah dikarenakan :

- 1) Jumlah peserta pelatihan dasar CPNS dari nilai penganggaran dengan 275 peserta, formasi yang disetujui kemenPAN RB dan formasi lulusan STTD sejumlah 50 peserta;
- 2) Bentuk kegiatan peningkatan kapasitas ASN yang semula direncanakan secara klasikal, karena masih tahap new normal diselenggarakan secara *blendid learning*, sehingga terjadi efisiensi anggaran;
- 3) Beberapa kegiatan masih dalam proses pelaksanaan, yaitu :
Pengadaan CASN, pengadaan kelengkapan kerja masih tahap uji laboratorium, pengiriman peserta peningkatan kompetensi disesuaikan dengan instansi pembina/penyelenggara diklat dan uji kompetensi pada tribulan III dan IV.

Tabel. 2.1.
Realisasi Target Kinerja dan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar sampai dengan tribulan 2 Tahun 2022

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra pada tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwula				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran BKPSDM Kota Blitar Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2022		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
		Vol	Satuan	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp		
							K	Rp	K	Rp						
1	2	3			4		5		6		7		8		9	10
Program Kepegawaian Daerah	Persentase pemenuhan pegawai sesuai kebutuhan	49	%	10.301.377.294	49	10.301.377.294	5	511.521.200	45,66	761609400	50,66	1.273.130.600	103,39%	12,36%	BKPSDM	BKPSDM
	Persentase data kepegawaian yang valid	58	%		58		11		40,88		51,88		89,45%			
	Persentase penempatan jabatan sesuai kompetensi	90,98	%		90,98		23		95,13		95,13		95,13%			
	Persentase ASN yang memiliki nilai Prestasi Kinerja minimal 80	88,86	%		88,86		28		29,04		57,04		64,19%			
	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	41,4	%		41,4		5		26,31		31,31		75,63%			
	Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi	41,93	%		41,93		30		39,49		69,49		69,49%			
Kegiatan : Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase usulan Formasi ASN yang disetujui	8	%	14.007.252.800	8	2.410.535.550	8	439.962.000	8,00	15773300	8,00	455.735.300	100,00%	18,91%	BKPSDM	BKPSDM
	Persentase layanan pensiun tepat waktu	100	%		100		100		100,00		100,00		100,00%			
	Persentase data kepegawaian yang dikelola	50	%		50		50		50,00		50,00		50,00%			
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah ASN yang mengikuti uji kesehatan	250	orang	10.492.062.350	250	1.729.121.550	162	34.962.000	162	10326500	324,00	45.288.500	129,60%	2,62%	BKPSDM	BKPSDM
	Jumlah Dokumen Formasi ASN	1	dokumen		1		1		1		2,00		200,00%			
	Jumlah Dokumen Sumpah Janji PNS	250	orang		250		162		162		324,00		129,60%			
	Jumlah Kartu Pegawai yang diusulkan	250	kartu		250		60		162		222,00		88,80%			

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra pada tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwula				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran BKPSDM Kota Blitar Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2022		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
		Vol	Satuan	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp		
							K	Rp	K	Rp						
1	2	3			4		5		6		7		8		9	10
	Jumlah peserta rapat kebutuhan ASN	100	orang		100		100		100		200,00		200,00%			
	Jumlah seleksi Penerimaan ASN	1	kali		1		1		1		2,00		200,00%			
	Jumlah SK Pengangkatan ASN	250	orang		250		162		162		324,00		129,60%			
	Jumlah SK pengangkatan Calon ASN	150	orang		150		162		162		324,00		216,00%			
	Jumlah SK Pemberhentian dan Perpanjangan PTT	2	SK		2		1		1		2,00		100,00%			
Sub kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah pensiun yang memperoleh tunjangan hari tua (THT) dan pensiun bulanan	137	buah	405.551.227	137	72.155.300	38	0	48		86,00	0	62,77%	0,00%	BKPSDM	BKPSDM
	Jumlah peserta sosialisasi klaim otomatis BUP	137	orang		137		38		48		86,00		62,77%			
	Jumlah SK Pensiun yang terselesaikan	150	orang		150		38		48		86,00		57,33%			
Sub kegiatan : Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang memiliki berkas data kepegawaian	700	orang	1.084.639.000	700	204.258.700	120	0	470	5446800	590	5.446.800	84,29%	2,67%	BKPSDM	BKPSDM
	Jumlah ASN yang terdokumentasi dalam data digital kepegawaian	1400	orang		1400		1400		1400		1500		107,14%			
Sub kegiatan : Fasilitasi Lembaga Mendapatkan Hibah Profesi ASN	Jumlah Lembaga yang Mendapatkan Hibah	1	lembaga	2.025.000.000	1	405.000.000	1	405.000.000	1	0	1,00	405.000.000	100,00%	100,00%	BKPSDM	BKPSDM
Kegiatan : Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN yang ditempatkan	70	%	5.430.181.025	70	989.802.900	12	189.000	95,13	26981900	95,13	27.170.900	135,90%	2,75%	BKPSDM	BKPSDM
Sub kegiatan : Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang memproses kenaikan pangkat, berkala, PAK dan PMK	2100	orang	5.430.181.025	2100	989.802.900	485	189.000	658,00	26981900	1.143,00	27.170.900	54,43%	2,75%		
	Jumlah peserta sosialisasi kepegawaian	300	orang		300		120		120,00		240,00		80,00%			
	Jumlah SK penempatan ASN	500	SK		500		262		262,00		524,00		104,80%			
Kegiatan :	Persentase SKP yang	90,3	%		90,36	2.663.384.6	10	32.917.0		5650200		38.567.200	22,13%	1,45%	BKPSDM	BKPSDM

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra pada tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwula				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran BKPSDM Kota Blitar Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2022		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
		Vol	Satuan	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp		
							K	Rp	K	Rp						
1	2	3			4		5		6		7		8		9	10
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	diverifikasi	6		1.482.041.879		44		00	10,00		20,00					M
Sub kegiatan : Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah SKP yang dievaluasi	1500	SKP	1.482.041.879	1500	2.663.384.644	221	32.917.000	823	5650200	1.044,00	38.567.200	69,60%	1,45%	BKPSDM	BKPSDM
	Jumlah ASN yang difasilitasi uji kesehatan	8	orang		8		0		0		-		0,00%			
	Jumlah ASN yang memperoleh kelengkapan kerja	600	orang		600		0		0		-		0,00%			
	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan	200	orang		200		0		0		-		0,00%			
	Jumlah Inspeksi mendadak (SIDAK) yang dilaksanakan	5	kali		5		1		2		3,00		60,00%			
	Jumlah Karis/Karsu yang terbit	50	buah		50		0		20		20,00		40,00%			
	Jumlah LHKPN yang dilaporkan	160	orang		160		160		188		348,00		217,50%			
	Jumlah LP2P yang dilaporkan	2000	orang		2000		1860		1860		1.860,00		93,00%			
	Jumlah pengajuan cuti yang ditindaklanjuti	250	orang		250		22		123		145,00		58,00%			
	Jumlah Peserta Pemantapan tugas	200	orang		200		80		80		160,00		80,00%			
	Jumlah Peserta Peningkatan Motivasi Pegawai	400	orang		400		0		0		-		0,00%			
	Jumlah peserta sosialisasi peraturan kepegawaian	300	orang		300		38		150		188,00		62,67%			
	Persentase kasus indisipliner yang ditindaklanjuti	80	%		80		80		80,00		160,00		200,00%			
	Persentase ijin cerai yang ditindaklanjuti	80	%		80		80		80,00		160,00		200,00%			
Kegiatan : Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi	7	%	41.902.910.524	7	4.237.654.200	1	38.453.200	3,00	713204000	4,00	751.657.200	57,14%	17,74%	BKPSDM	BKPSDM
	Persentase ASN tenaga	5,5	%		5,5		0									

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra pada tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwula				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran BKPSDM Kota Blitar Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2022		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
		Vol	Satuan	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp		
							K	Rp	K	Rp						
1	2	3			4		5		6		7		8		9	10
	fungsional yang melaksanakan diklat								-		-					
Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang mengikuti coaching dan mentoring	70	orang	10.109.783.419	70	1.130.061.100	0	0	70,00	123786000	70,00	123.786.000	100,00%	10,95%		
	Jumlah ASN yang mengikuti Orientasi ASN	250	orang		250		0		168,00		168,00		67,20%			
Sub kegiatan : Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Prajabatan/ Pelatihan Dasar bagi CPNS daerah	250	orang	34.595.489.123	250	3.107.593.100	0	38.453.200	165,00	589418000	165,00	627.871.200	66,00%	20,20%	BKPSDM	BKPSDM
	Jumlah ASN yang mengikuti diklat struktural	29	orang		29		13		29,00		29,00		100,00%			
	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis/Fungsional/ Sosial Kultural/Uji Kompetensi	150	orang		150		40		40,00		80,00		53,33%			
	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi/Sertifikasi Kompetensi	5	orang		5		0		-		-		0,00%			
	Jumlah dokumen hasil Analisa Kebutuhan Diklat (AKD)	0	dokumen								-					
	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi Dampak Diklat (EDD)	0	dokumen								-					
	Jumlah tahapan pembangunan Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia (balai diklat)	0	tahap								-					
Program pengembangan SDM	Persentase ASN dengan pendidikan tinggi dan menengah	96,85	%	855.630.908	96,65	134.735.400	96	0	96,02	44777700	96,02	44.777.700	99,35%	33,23%	BKPSDM	
Kegiatan : Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	7,2	%	855.630.908	1,2	134.735.400	0	0	0,80	44777700	0,80	44.777.700	66,67%	33,23%	BKPSDM	
Sub kegiatan : Penyelenggaraan	Jumlah ASN yang mengikuti fit & proper	200	orang	855.630.908	0	134.735.400	0	0	115,00	44777700	115	44.777.700	57,50%	33,23%	BKPSDM	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra pada tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwula				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran BKPSDM Kota Blitar Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2022		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
		Vol	Satuan	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp		
							K	Rp	K	Rp						
1	2	3			4		5		6		7		8		9	10
Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	test															
	Persentase ASN mengajukan ijin tugas belajar dan ijin belajar yang ditindaklanjuti	98	%		98		98		98,00		98,00		100,00%		BKPSDM	
	Persentase ASN mengajukan ujian dinas dan penyesuaian ijazah yang ditindaklanjuti	90	%		98		98		98,00		98,00		100,00%		BKPSDM	
	Jumlah ASN yang dipetakan kompetensinya	700	orang		300		100		100,00		100,00		33,33%		BKPSDM	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84	baik	44.703.343.379	83	9.114.613.099	83	1.778.800.203	83,00	1729798184	83,00	3.508.598.387	100,00%	38,49%	BKPSDM	
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Standar	100	%	312.766.908	100	58.599.600	22	0	23,00	6336000	45,00	6.336.000	45,00%	10,81%	BKPSDM	
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (Renstra, PK, Renaksi, SPP, SOP, Renja, RKA, DPA, PRKA, DPPA)	60	dokumen	97.509.748	10	18.225.000	3	0	3,00	3328800	6,00	3.328.800	60,00%	18,27%	BKPSDM	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra pada tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwula				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran BKPSDM Kota Blitar Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2022		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
		Vol	Satuan	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp		
							K	Rp	K	Rp						
1	2	3			4		5		6		7		8		9	10
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun (LKjIP, LKPJ, LPPD, SKM, SPM, Ev.RKPD, Pengukuran Kinerja Tribunal	48	dokumen	215.257.160	8	40.374.600	3	0	3,00	3007200	6,00	3.007.200	75,00%	7,45%	BKPSDM	
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	%	35.357.274.695	100	7.760.129.173	25	1.536.368.938	25,00	1621349192	50,00	3.157.718.130	50,00%	40,69%	BKPSDM	
Sub kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan	33	orang	24.235.750.605	33	3.942.630.691	33	743.597.842	34	824363019	67,00	1.567.960.861	203,03%	39,77%	BKPSDM	
Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Honoror / Pegawai tidak tetap yang diberikan	240	orang	11.080.140.950	80	3.809.778.282	79	792.771.096	80	794337173	80,00	1.587.108.269	100,00%	41,66%	BKPSDM	
Sub kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Jumlah jenis Laporan Keuangan yang tersusun (Bulanan / Semesteran)	72	dokumen	41.383.137	12	7.720.200	3	0	3	2649000	6,00	2.649.000	50,00%	34,31%	BKPSDM	
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	%	2.032.161.550	100	373.087.500	25	150.165.800	25,00	270000	50,00	150.435.800	50,00%	40,32%	BKPSDM	
Sub kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	24	event	501.120.572	4	112.305.100	0	0	2	270000	2,00	270.000	50,00%	0,24%	BKPSDM	
	Jumlah publikasi program / kegiatan perangkat daerah	1	kali		1		0		0	0	-		0,00%		BKPSDM	
Sub kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	29	orang	1.396.500.338	29	260.782.400	29	150.165.800	29	0	58,00	150.165.800	200,00%	57,58%	BKPSDM	
Kegiatan :	Persentase	100	%		100	670.954.67	25	74.815.4		65959992		140.775.45	50,00%	20,98%	BKPSDM	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra pada tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwula				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran BKPSDM Kota Blitar Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2022		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
		Vol	Satuan	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp			
							K	Rp	K	Rp							
1	2	3			4		5		6		7		8		9	10	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	keseterediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar			4.060.292.620		6		65	25,00			50,00	7				
Sub kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan atau Peralatan Gedung Kantor yang tersedia	66	unit	456.973.369	24	34.792.800	4	0	4	0	8,00	0	33,33%	0,00%	BKPSDM		
Sub kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	6	jenis	73.922.394	4	10.659.876	1	0	1	0	2,00	1	50,00%	0,00%	BKPSDM		
Sub kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos / kotak makanan dan minuman yang tersedia	9000	dos	456.973.369	1500	124.101.800	225	21.729.336	225	26697152	450,00	48.426.488	30,00%	39,02%	BKPSDM		
	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	68	jenis		68		14		25	0	39,00		57,35%		BKPSDM		
Sub kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	15	jenis	456.973.369	15	45.552.200	5	9.512.400	0	2636400	5,00	12.148.800	33,33%	26,67%	BKPSDM		
	Jumlah lembar Penggandaan	584881	lembar		102.788		4.560		84.560	0	89.120		86,70%		BKPSDM		
Sub kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	4320	buah	42.158.531	720	6.600.000	180	1.080.000	180,00	540000	360,00	1.620.000	50,00%	24,55%	BKPSDM		
Sub kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	270	kali	27.769.822.632	45	449.248.000	9	42.493.729	21,00	36086440	30,00	78.580.169	66,67%	17,49%	BKPSDM		
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100	%	903.591.750	100	126.000.000	25	0	25,00	29400000	50,00	29.400.000	50,00%	23,33%	BKPSDM		
Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan (termasuk listrik, air, telepon, internet)	4	rekening	903.591.750	1	126.000.000	1	0	1,00	29400000	2,00	29.400.000	200,00%	23,33%	BKPSDM		

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra pada tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwula				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran BKPSDM Kota Blitar Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2022		Unit Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
		Vol	Satuan	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp		
							K	Rp	K	Rp						
1	2	3			4		5		6		7		8		9	10
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100	%	800.690.856	100	125.842.150	25	17.450.000	25,00	6483000	50,00	23.933.000	50,00%	19,02%	BKPSDM	
Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	15	unit	456.973.369	9	66.844.750	4	2.630.000	6,00	6483000	10,00	9.113.000	111,11%	13,63%	BKPSDM	
	Jumlah kendaraan dinas / operasioanl yang terpelihara	3	unit		2		2		2,00	0	2,00		100,00%		BKPSDM	
Sub kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (termasuk komputer, laptop, PC, printer, TV, Scanner, Kamera, Mesin fax)	529	unit	219.007.876	88	34.171.400	16	8.460.000	-	0	16,00	8.460.000	18,18%	24,76%	BKPSDM	
Sub kegiatan: Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (termasuk AC, Exaust fan, kipas angin yang menempel di dinding, mebelair)	332	unit	459.720.462	56	24.826.000	12	6.360.000	-	0	12,00	6.360.000	21,43%	25,62%	BKPSDM	

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DALAM PERUBAHAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2022

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2022 ini akan dimuat tentang kegiatan lanjutan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan

3.1 Rekapitulasi Perubahan Kegiatan Renja Tahun 2022

Secara ringkas dari total kegiatan sebanyak 11 kegiatan dan 26 sub kegiatan, terdapat 15 sub kegiatan (57,69%) tidak mengalami perubahan, sebanyak 11 sub kegiatan (42,31%) mengalami perubahan (7 sub kegiatan mengalami pengurangan dan 4 sub kegiatan mengalami penambahan) di Perubahan Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2022. Adapun rincian perubahan kegiatan dalam Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1. Rekapitulasi Perubahan Sub Kegiatan Renja BKPSDM Kota Blitar Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Dalam Perubahan Renja			
		Tetap	Bertambah	Berkurang	Jumlah
1.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar	15	4	7	26

Sumber : SIPD, Juli 2022

Dari tabel diatas, sub kegiatan yang ada dalam APBD Penetapan Tahun 2022 dan tidak mengalami penambahan maupun pengurangan baik target kinerja maupun pagu indikatif pada Perubahan Renja Tahun 2022 sebanyak 16 kegiatan. Adapun sub kegiatan yang tidak mengalami

perubahan pagu anggaran pada renja perubahan seperti tersebut dalam tabel 3.2. dibawah ini :

Tabel 3.2 Kegiatan Yang Tidak Mengalami Perubahan Pagu Anggaran Pada Renja Perubahan Tahun 2022

No.	Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)		Bertambah / Berkurang
		APBD Penetapan	Perubahan Renja	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.225.000	18.225.000	0
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	40.374.600	40.374.600	0
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.809.778.282	3.809.778.282	0
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	7.720.200	7.720.200	0
5	Penyediaan Peralatan rumah tangga	10.659.876	10.659.876	0
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.552.200	45.552.200	0
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.600.000	6.600.000	0
8	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	126.000.000	126.000.000	0
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan ,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	66.844.750	66.844.750	0
10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.171.400	34.171.400	0
11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	24.826.000	24.826.000	0
12	Koordinasi Pelaksanaan Adminstrasi Pemberhentian	72.155.300	72.155.300	0
13	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	405.000.000	405.000.000	0
14	Evaluasi data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	204.258.700	204.258.700	0
15	Pengelolaan Mutasi ASN	989.802.900	989.802.900	0

Sumber : SIPD, Juli 2022

Sub kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran adalah kegiatan yang mengalami pengurangan baik target kinerja dan/pagu indikatif sebanyak 7 sub kegiatan. Hal ini disebabkan karena :

- Adanya penyesuaian kembali terhadap belanja guna efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.
- Penyesuaian pada belanja bahan untuk penunjang prokes yang tidak lagi dibelanjakan.

- Penyesuaian jumlah peserta pelatihan dasar CPNS dari nilai penganggaran dengan 275 peserta, formasi yang disetujui kemenPAN RB dan formasi lulusan STTD sejumlah 50 peserta.
- Penyesuaian anggaran yang semula dijadwalkan klasikal menjadi blended learning.

Adapun kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran dapat dilihat dalam tabel 3.3. dibawah ini:

Tabel. 3.3. Sub Kegiatan Yang Mengalami Pengurangan Pagu Anggaran Pada Renja Perubahan Tahun 2022

No.	Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)		Bertambah / Berkurang
		APBD Penetapan	Perubahan Renja	
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	260.782.400	161.974.400	-98.808.000
2	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	1.130.061.100	972.308.500	-157.752.600
3	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikat ASN	3.107.593.100	2.483.635.100	-623.958.000
4	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	134.735.400	97.285.500	-37.449.900
5	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	112.305.100	100.200.200	-12.104.900
6	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1.729.121.550	1.707.969.550	-21.152.000
7	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2.663.384.644	2.650.369.644	-13.015.000
		9.137.983.294	8.173.742.894	-964.240.400

Sumber : SIPD, Juli 2022

Sub kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran sebanyak 3 sub kegiatan. Penambahan kegiatan tersebut dianggarkan untuk :

- Pembelian sarana dan prasarana penunjang kegiatan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penyediaan Gaji Tunjangan ASN

Kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran dapat dilihat dalam tabel 3.4 dibawah ini.

Tabel 3.4. Sub Kegiatan Yang Mengalami Penambahan Pagu Anggaran Pada Renja Perubahan Tahun 2022

No.	Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)		Bertambah / Berkurang
		APBD Penetapan	Perubahan Renja	
1	Penyediaan Gaji Tunjangan ASN	3.942.630.691	4.626.337.445	683.706.754
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.792.800	249.246.600	214.453.800
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	449.248.000	488.871.000	39.623.000
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	124.101.800	156.223.800	32.122.000
		4.550.773.291	5.520.678.845	969.905.554

Sumber : SIPD, 2022

3.2 Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2022

Kebijakan belanja pada perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2022 diarahkan pada:

- Pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam rangka pencapaian target indikator kinerja daerah pada tahun 2022;
- Penyesuaian Gaji dan Tunjangan ASN.
- Dicabutnya aturan pembatasan (PPKM) berpengaruh pada kegiatan baik didalam dan luar daerah.

Dengan kebijakan belanja tersebut, mengakibatkan perubahan target dan pagu indikatif. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif perubahan renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar tahun 2022 terlihat dalam tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5 Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				
			Target Indikator		Pagu Anggaran (Rp.)		Perubahan
			Renja 2022	Renja Perubahan 2022	Renja 2022	Renja Perubahan 2022	
5 0 3 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00 (baik)	83,00 (Baik)	9.114.613.099	9.973.605.753	858.992.654
5 0 3 1 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	58.599.600	58.599.600	0
5 0 3 1 01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (Renstra, PK, Renaksi,SPP, SOP, Renja, RKA, DPA,PRKA, DPPA)	10 dokumen	10 dokumen	18.225.000	18.225.000	0
5 0 3 1 01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun (LKjIP, LKPJ, LPPD, SKM, SPM, Evaluasi RKPD, Pengukuran kinerja tribulan)	8 dokumen	8 dokumen	40.374.600	40.374.600	0
5 0 3 1 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan administrasi Keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	7.760.129.173	8.443.835.927	683.706.754
5 0 3 1 02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan	33 orang	34 orang	3.942.630.691	4.626.337.445	683.706.754
5 0 3 1 02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Honorer/pegawai tidak tetap yang diberikan honorarium/gaji	80 orang	80 orang	3.809.778.282	3.809.778.282	0
5 0 3 1 02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulann/Semesteran SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Bulanan/Semester yang disusun	12 dokumen	12 dokumen	7.720.200	7.720.200	0
5 0 3 1 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perangkat Daerah yang sesuai standar	100 %	100 %	373.087.500	262.174.600	-110.912.900
5 0 3 1 05 0	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah	4 event 1 kali	2 event 3 kali	112.305.100	100.200.200	-12.104.900

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perubahan
			Target Indikator		Pagu Anggaran (Rp.)		
			Renja 2022	Renja Perubahan 2022	Renja 2022	Renja Perubahan 2022	
5 3 1 05 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis/pelatihan/di teknis dengan nila baik	29 orang	29 orang	260.782.400	161.974.400	-98.808.000
5 3 1 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	100%	670.954.676	957.153.476	286.198.800
5 3 1 06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan dan atau peralatan gedung kantor yang tersedia	24 unit	37 unit	34.792.800	249.246.600	214.453.800
5 3 1 06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	4 jenis	4 jenis	10.659.876	10.659.876	0
5 3 1 06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	1500 dos 68 jenis	1500 dos 68 jenis	124.101.800	156.223.800	32.122.000
5 3 1 06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia Jumlah lembar penggandaan	15 jenis 102788 lembaran	15 jenis 102788 lembaran	45.552.200	45.552.200	0
5 3 1 06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	720 buah	720 buah	6.600.000	6.600.000	0
5 3 1 06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	45 kali	68 kali	449.248.000	488.871.000	39.623.000
5 3 1 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	100 %	126.000.000	126.000.000	0
5 3 1 08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan (termasuk listri, air, telepon, internet)	1 rekening	1 rekening	126.000.000	126.000.000	0
5 3 1 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	100 %	100 %	125.842.150	125.842.150	0
5 3 1 09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	2 unit 9 unit	2 unit 9 unit	66.844.750	66.844.750	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perubahan
			Target Indikator		Pagu Anggaran (Rp.)		
			Renja 2022	Renja Perubahan 2022	Renja 2022	Renja Perubahan 2022	
5 0 3 1 0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (termasuk komputer, laptop, PC, printer, TV, Scanner, Kamera, mesin fax)	88 unit	88 unit	34.171.400	34.171.400	0
5 0 3 1 2 1	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (termasuk AC, Exhaust fan, kipas angin yang menempel di dinding, mebelair)	56 unit	56 unit	24.826.000	24.826.000	0
5 0 3 2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan pegawai sesuai kebutuhan	49 %	49 %	10.301.377.294	9.485.499.694	-815.877.600
		Persentase data ke pegawaian yang valid	58 %	58 %			
		Persentase penempatan jabatan sesuai kompetensi	90,98 %	90,98 %			
		Persentase ASN yang memliki nilai prestasi kinerja minimal 80	88,86 %	88,86 %			
		Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	41,40 %	41,40 %			
		Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi	41,93 %	41,93 %			
5 0 3 2 0 1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase usulan formasi ASN yang disetujui	8 %	8 %	2.410.535.550	2.389.383.550	-21.152.000
		Persentase layanan pensiun tepat waktu	100 %	100 %			
		Persentase data kepegawaian yang dikelola	95%	95%			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023					
			Target Indikator		Pagu Anggaran (Rp.)		Perubahan	
			Renja 2022	Renja Perubahan 2022	Renja 2022	Renja Perubahan 2022		
5 0 0 2. 0	3 2 01 3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah ASN yang mengikuti uji kesehatan	250 orang	250 orang	1.729.121.550	1.707.969.550	-21.152.000
			Jumlah dokumen formasi ASN	1 dokumen	1 dokumen			
			Jumlah dokumen sumpah janji PNS	250 dokumen	250 dokumen			
			Jumlah Kartu Pegawai yang diusulkan	250 Kartu	250 Kartu			
			Jumlah peserta rapat kebutuhan ASN	100 orang	100 orang			
			Jumlah seleksi penerimaan ASN					
			Jumlah SK Pengangkatan ASN	1 kali	1 kali			
			Jumlah SK Pengangkatan calon ASN	250 SK	250 SK			
				150 SK	150 SK			
			Jumlah SK Perberhentian dan perpanjangan PTT	2 SK	2 SK			
5 0 0 2. 0	3 2 01 6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Kartu Identitas Pensiun (KARIP) yang terbit	137 buah	137 buah	72.155.300	72.155.300	0
			Jumlah pensiun yang memperoleh Tunjangan Hari Tua (THT) dan pensiun bulanan	137 orang	137 orang			
			Jumlah peserta sosialisasi klaim otomatis BUP	150 orang	150 orang			
			Jumlah SK pensiun yang terselesaikan	137 SK	137 SK			
5 0 0 2. 0	3 2 01 8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga yang Mendapatkan Hibah	1 lembaga	1 lembaga	405.000.000	405.000.000	0
5 0 0 2. 1	3 2 01 2	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang memiliki berkas data kepegawaian	700 orang	700 orang	204.258.700	204.258.700	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perubahan	
			Target Indikator		Pagu Anggaran (Rp.)			
			Renja 2022	Renja Perubahan 2022	Renja 2022	Renja Perubahan 2022		
		Jumlah ASN yang terdokumentasi dalam data digital kepegawaian	1400 orang	1400 orang				
5 0 3	0 2 02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN yang ditempatkan	70 %	70 %	989.802.900	989.802.900	0
5 0 3	0 2 02	0 1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang memproses kenaikan pangkat, berkala, PAK dan PMK Jumlah peserta sosialisasi kepegawaian Jumlah SK Penempatan ASN	2100 orang 300 orang 500 SK	2100 orang 300 orang 500 SK	989.802.900 989.802.900	0
5 0 3	0 2 03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi	7 %	7 %	4.237.654.200	3.455.943.600	-781.710.600
			Persentase ASN tenaga fungsional yang melaksanakan diklat	5,5 %	5,5 %			
5 0 3	0 2 03	0 1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang mengikuti coaching dan mentoring Jumlah ASN yang mengikuti orientasi ASN	70 orang 250 orang	70 orang 250 orang	1.130.061.100 972.308.500	-157.752.600
5 0 3	0 2 03	0 3	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Prajabatan/Pelatih Dasar bagi CPNS da Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Struktural Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis/Fungsional/ Kultural/Uji Kompe Jumlah dokumen h Evaluasi Dampak D (EDD) Jumlah Pejabat Fungsional Yang Mengikuti Uji Kompetensi/Sertifi Kompetensi Jumlah tahapan pembangunan Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia (bal diklat)	250 Orang 29 Orang 150 Orang 1 Dokumen 5 orang 1 tahap	50 Orang 29 Orang 150 Orang 1 Dokumen 5 orang 0 tahap	3.107.593.100 2.483.635.100	-623.958.000
5 0 3	0 2 04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase SKP yang diverifikasi	90,36	90,36	2.663.384.644	2.650.369.644	-13.015.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perubahan
			Target Indikator		Pagu Anggaran (Rp.)		
			Renja 2022	Renja Perubahan 2022	Renja 2022	Renja Perubahan 2022	
5 0 0 2 04 2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang difasilitasi uji kesehatan Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan Jumlah ASN yang memperoleh kelengkapan kerja Jumlah inspeksi mendadak (SIDAK) yang dilaksanakan JUmlah Karis/Karsu yang terbit Jumlah LHKPN yang dilaporkan Jumlah LP2P yang dilaporkan Jumlah pengajuan cuti yang ditindak lanjuti Jumlah peserta pemantapan tugas Jumlah peserta peningkatan motivasi pegawai Jumlah peserta sosialisasi peraturan kepegawaian Jumlah SKP yang dievaluasi Persentase kasus indisipliner yang ditindaklanjuti Persentase pengajuan ijin cerai yang ditindaklanjuti	8 orang 200 orang 600 orang 5 kali 50 buah 160 orang 2000 orang 250 orang 200 orang 400 orang 300 orang 1500 SKP 80 % 80 %	8 orang 200 orang 600 orang 5 kali 50 buah 160 orang 2000 orang 250 orang 200 orang 400 orang 300 orang 1500 SKP 80 % 80 %	2.663.384.644 2.650.369.644	0 0	
5 0 4 0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN dengan pendidikan tinggi dan menengah	96,65 %	96,65 %	134.735.400	97.285.500	-37.449.900
5 0 4 0 2 01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	1,20 %	1,20 %	134.735.400	97.285.500	-37.449.900
5 0 4 0 2 01 3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang dipetakan kompetensinya Persentase ASN yang mengajukan ijin tugas belajar dan ijin belajar yang ditindaklanjuti Persentase ASN yang mengajukan ujian dinas dan penyesuaian ijazah yang ditindaklanjuti	300 orang 98 % 98 %	300 orang 98 % 98 %	134.735.400	97.285.500	-37.449.900

Sumber : SIPD BKPSDM Kota Blitar, Juli 2022

Pada Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selain pelaksanaan atas program dan kegiatan, juga difokuskan untuk:

1. Mengatasi kekurangan pegawai melalui pengajuan usulan formasi pengadaan CPNS prioritas sesuai kebutuhan dan penerimaan mutasi PNS dari luar daerah secara selektif sesuai kebutuhan;
2. Peningkatan layanan berbasis online system yang terintegrasi;
3. Pengukuran Indeks Profesionalisme Aparatur Negara secara berkelanjutan pada OPD di lingkungan Kota Blitar;
4. Pemetaan Potensi PNS;
5. Peningkatan kualitas kedisiplinan PNS dengan penyempurnaan regulasi kepegawaian yang dibutuhkan;
6. Peningkatan kualitas pengelolaan arsip kepegawaian berbasis elektronik serta pengembangan simpeg terintegrasi.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2022 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2022 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Kota Blitar.

4.1. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2022, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- 1) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2022 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2022.
- 2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
 - c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 akan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2022 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target yang telah ditetapkan.

Blitar, 5 Agustus 2022
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Kota Blitar



KUSNO, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 196707221992021002